



KATALOG BPS: 9302003.1571

PDRB

KOTA JAMBI

MENURUT PENGGUNAAN

2014



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAMBI***



KATALOG BPS: 9302003.1571

PDRB KOTA JAMBI

MENURUT PENGGUNAAN

2014



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAMBI***

PDRB KOTA JAMBI MENURUT PENGGUNAAN 2014

No. Publikasi : 15715 .1507

Katalog BPS : 9302003.1571

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : iv + 26 Halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Jambi

Penyunting :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Jambi

Gambar :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Jambi

Diterbitkan oleh :
BPS Kota Jambi.

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Guna memberikan gambaran keadaan perekonomian Kota Jambi dan mendeteksi fenomena yang terus berkembang dewasa ini, diperlukan adanya suatu indikator makro yang didukung data statistik ekonomi yang akurat dan tepat waktu.

Dalam Publikasi PDRB Kota Jambi Menurut Penggunaan 2014 ini ditampilkan data mengenai kondisi ekonomi Kota Jambi yang mencakup data nilai PDRB menurut penggunaan serta laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Walaupun dalam penerbitan publikasi ini telah diupayakan untuk menyajikan berbagai indikator ekonomi secara lengkap, namun kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu saran dan kritik guna perbaikan publikasi ini sangat kami harapkan. Kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan.

Jambi, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Jambi,

PANGORIAN MARPAUNG, SE

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR KEPALA BPS KOTA JAMBI.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL POKOK.....	iv
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
 BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN	
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	5
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	7
2.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	9
2.5. Perubahan Inventori	11
2.6. Penghitungan Ekspor-Impor	13
 BAB III. TINJAUAN PDRB KOTA JAMBI MENURUT PENGGUNAAN 2012	
3.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	16
3.2. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba	17
3.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	17
3.4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	18
3.5. Perubahan Stok	18
3.6. Ekspor-Impor	19
 TABEL-TABEL POKOK.....	 20

DAFTAR TABEL POKOK

Judul Tabel	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2012-2014 (Juta Rupiah).	21
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan Tahun 2012-2014 (Juta Rupiah).....	22
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2012-2014.....	23
Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2012-2014.....	24
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Menurut Penggunaan Tahun 2012-2014	25
Tabel 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi Menurut Penggunaan Tahun 2012-2014.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki arti sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDRB atau jika dihitung dalam skala nasional disebut Produk Domestik Bruto (PDB) berbeda dari Produk Nasional Bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

Terdapat tiga pendekatan dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto, ketiga pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya. Pendekatan ini bisa juga disebut pendekatan nilai tambah.

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam proses produksi dari input antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam proses produksi.

2. Pendekatan Pendapatan

Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Yang termasuk dalam surplus usaha adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

3. Pendekatan Penggunaan/ Pengeluaran

Pada pendekatan ini, PDRB dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir. Secara umum, pendekatan penggunaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan penawaran dan pendekatan permintaan. Pada prinsipnya, pendekatan penggunaan ini dimaksudkan untuk memperkirakan komponen-komponen permintaan akhir yaitu: konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir lembaga swasta nirlaba yang melayani rumah tangga, konsumsi akhir pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB), perubahan inventori dan perdagangan antar wilayah (ekspor dan impor).

Pada kenyataannya, barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akhir penyediaannya tidak hanya berasal dari daerah yang bersangkutan tetapi juga berasal dari daerah/wilayah/Negara lain seperti impor dan ekspor antar kota/kabupaten/propinsi atau negara. Secara ringkas PDRB dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = C + I_f + I_s + E - M$$

Dimana: Y = Produk Domestik Regional Bruto

C = Konsumsi (meliputi konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Nirlaba, Pemerintah)

If = Pembentukan Modal Tetap Bruto

Is = Perubahan Inventori

E = Ekspor

M = Impor

Dari persamaan di atas, dapat diuraikan bahwa PDRB menurut penggunaan digolongkan dalam tiga komponen utama yaitu:

1. Konsumsi, yang mencakup:
 - a. Konsumsi Rumah Tangga
 - b. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba
 - c. Konsumsi Pemerintah
2. Pembentukan Modal, mencakup:
 - a. Pembentukan Modal Tetap Bruto
 - b. Perubahan inventori barang jadi, setengah jadi dan bahan mentah
3. Penggunaan di Luar Wilayah Netto
 - a. Ekspor ke luar negeri dan ke luar wilayah
 - b. Impor dari luar negeri dan luar wilayah

BAB II

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA

Metode penghitungan untuk memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga pada publikasi ini menggunakan metode langsung yang didasarkan pada survei-survei Badan Pusat Statistik yang berbasis pengeluaran konsumsi rumah tangga, antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Biaya Hidup (SBH), serta Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT). Metode langsung ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh perkiraan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara keseluruhan dengan cara mempergunakan ratio yang diperoleh dari survei-survei tersebut. Data yang dikumpulkan dengan metode ini mengukur arus barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga atas dasar harga pembelian. Data konsumsi rumah tangga hasil SUSENAS biasanya ditanyakan untuk periode satu minggu untuk konsumsi bahan makanan dan periode satu bulan untuk konsumsi bukan makanan.

Pada dasarnya konsumsi rumah tangga secara keseluruhan meliputi:

1. Makanan, minuman dan rokok
2. Perumahan, perkakas, perlengkapan dan peyelenggaraan rumah tangga
3. Kesehatan dan pendidikan
4. Pakaian dan alas kaki
5. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya
6. Hotel dan restoran
7. Lainnya

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga(LNPRT) adalah lembaga formal atau informal yang dibentuk oleh perorangan, kelompok masyarakat, pemerintah atau oleh dunia usaha dalam rangka menyediakan jasa sosial kemasyarakatan khususnya bagi anggota maupun kelompok masyarakat tertentu tanpa ada motivasi untuk memperoleh keuntungan.

Jasa Lembaga Non Profit yang menghasilkan jasa non komersil tersebut, menurut sumber pembiayaannya diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu:

1. Sektor pemerintahan umum, yaitu Lembaga Non Profit yang sumber pembiayaannya sebagian besar dari pemerintah
2. Sektor Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), yaitu Lembaga Non Profit yang sumber pembiayaannya dari anggota masyarakat

Dalam penghitungan PDRB menurut penggunaan, yang termasuk pengeluaran konsumsi lembaga non profit adalah lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Lembaga Non Profit Rumah Tangga ini dibedakan atas tujuh bentuk yaitu:

1. **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi.
Contohnya: Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), KAMMI, HMI, Kosgoro, MKGR, Kowani, KNPI dan sebagainya.
2. **Organisasi Sosial (Orsos)** adalah lembaga, organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik

berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Organisasi ini mencakup seluruh organisasi penyelenggara panti.

Contohnya: Panti Asuhan, Panti Wreda, Panti Rehabilitasi Cacat dan sebagainya.

3. **Organisasi Profesi** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat terpelajar dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota serta sebagai wahana pengabdian masyarakat.

Contohnya: IDI, ISEI, Ikatan Statistik Indonesia dan sebagainya.

4. **Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olah Raga dan Hobi** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan dan apresiasi budaya, olah raga, hobi dan kegiatan yang bersifat sosial.

Contohnya: Perkumpulan Rotari Indonesia, Padepokan Seni Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan, Ikatan Motor Indonesia, RAPI, ORARI, FORKI dan sebagainya.

5. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya.

Contohnya: Lembaga Studi Pembangunan, YLKI, Walhi, YLBHI, Yayasan Dian Desa, Lembaga Pengkajian Strategi Indonesia, dan sebagainya.

6. **Lembaga Keagamaan** adalah organisasi, perkumpulan, yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan yang bertujuan membina, mengembangkan atau mensyiarkan agama.

Contohnya: Pondok Pesantren, Gereja, Masjid, PGI, KWI, Walubi, Parisadha Hindu Dharma Indonesia, dan sebagainya.

7. **Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa** adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana dan atau beasiswa bagi yang membutuhkan atas dasar kemanusiaan, cinta sesama dan solidaritas.

Contohnya: Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Bimantara, Yayasan Kesejahteraan Gotong Royong, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dan sebagainya.

Perkiraan Pengeluaran konsumsi kelompok ini meliputi output jasa sosial kemasyarakatan menurut lapangan usaha yang dikumpulkan dari tujuh jenis lembaga swasta nirlaba di atas.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi pemerintah meliputi semua pengeluaran konsumsi untuk menjalankan kegiatan administrasi pemerintah dan pertahanan, tidak termasuk pengeluaran konsumsi oleh perusahaan milik pemerintah karena perusahaan milik pemerintah tersebut telah dimasukkan dalam kelompok usaha masing-masing seperti: Perum, Perjan, Persero, PN, PD dan sebagainya.

Pengeluaran konsumsi pemerintah yang dimaksud adalah pengeluaran yang sifatnya habis dipakai dalam proses produksi setelah dikurangi dengan

penjumlahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, yaitu nilai output akhir pemerintah yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai serta perkiraan penyusutan barang modal pemerintah dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah. Termasuk pula pengeluaran pertahanan dan keamanan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut terdiri dari:

1. Pengeluaran pemerintah untuk membayar upah dan gaji pegawai, baik untuk PNS maupun TNI, termasuk honor, bonus, lembur, pension, pembelian pakaian dinas dan lain-lain belanja pegawai yang berbentuk uang maupun barang.
2. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam proses produksi seperti belanja perjalanan pegawai, biaya perbaikan kendaraan dinas, perbaikan kantor dan rumah dinas, pembelian alat-alat tulis serta perbaikan alat inventaris dan sebagainya termasuk juga di sini pembelian barang modal untuk pertahanan dan keamanan.
3. Penyusutan di sektor pemerintah meliputi penyusutan terhadap gedung, mesin-mesin dan peralatannya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
4. Nilai Output Bank Indonesia

Konsumsi pemerintah menurut harga konstan dapat diperoleh jika neraca produksi menurut harga konstan diperoleh. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara ekstrapolasi atau deflasi terhadap butir-butir neraca produksi menurut harga berlaku, untuk melakukan deflasi dibutuhkan data indeks harga barang yang

dikonsumsi pemerintah. Karena indeks yang belum tersedia maka dilakukan pendekatan sebagai berikut:

1. Mengekstrapolasikan belanja pegawai tahun dasar dengan indeks jumlah pegawai
2. Mendeflasikan belanja barang tiap tahun dengan IHPB tanpa Ekspor, tahun yang sesuai
3. Mengekstrapolasikan penyusutan dengan indeks yang sesuai atau mengalikan belanja pegawai yang telah diekstrapolasikan dengan 5 persen

Hasil penkonstanan di atas merupakan output menurut harga konstan. Hasil kali rasio konsumsi pemerintah menurut harga belaku dengan total nilai output menurut harga konstan digunakan untuk menduga nilai konsumsi pemerintah menurut harga konstan.

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah , yang digunakan untuk berproduksi di dalam negeri/wilayah tersebut. Kategori barang modal yaitu barang yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian adalah penggunaan barang modal sebagai alat yang tetap dalam berproduksi. Yang termasuk barang modal adalah barang yang mempunyai ciri-ciri:

1. Mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, sehingga mempunyai nilai penyusutan

2. Pengeluaran untuk barang modal mempunyai manfaat/hasil pada masa yang akan datang atau dalam jangka waktu yang relatif panjang
3. Nilai per unit dari barang modal relatif besar dibanding dengan output sektor yang memakainya

Barang-barang yang tidak diproduksi kembali seperti tanah, cadangan mineral tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Akan tetapi pengeluaran untuk meningkatkan penggunaan tanah seperti pembukaan hutan untuk dijadikan areal perkebunan, daerah pemukiman, bendungan dan lain-lain serta pengeluaran untuk perluasan areal pertambangan semuanya merupakan pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto.

Menurut wujudnya pembentukan modal tetap domestik bruto mencakup lima hal:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan/konstruksi, seperti:
 - a. Bangunan tempat tinggal
 - b. Bangunan bukan tempat tinggal
 - c. Bangunan/konstruksi lainnya, seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas & air dan monument
 - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan di atas
 - e. Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan, yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan

pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum

2. Pembentukan modal tetap berupa mesin dan alat perlengkapan, terdiri dari:
 - a. Alat-alat transportasi seperti: kapal laut, pesawat, kereta api, bus, truk dan motor
 - b. Mesin dan alat perlengkapan untuk pertanian, listrik, pertambangan, pembuatan jalan, jembatan, perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, dan lain-lain. Mesin dan alat perlengkapan yang masih dalam proses pembuatan tidak termasuk dalam pembentukan modal, melainkan merupakan inventori dari produsennya
3. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Tanaman keras yang dimaksud adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih
4. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susunya atau bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong
5. Margin perdagangan atau makelar, jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas tercakup dalam pembentukan modal tetap

2.5. PERUBAHAN INVENTORI

Inventori merupakan persediaan barang, baik berasal dari pembelian, yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau dijual lagi,

maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik dalam bentuk barang jadi maupun barang setengah jadi.

Pemegang inventori adalah produsen, pedagang, dan pemerintah. Inventori pemerintah merupakan barang-barang yang dibeli untuk keperluan strategi, seperti bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan guna keperluan waktu kritis. Alat berat seperti kapal dan pesawat merupakan inventori bagi pihak produsen. Sementara bangunan yang sedang dikerjakan tidak termasuk inventori, melainkan merupakan pembentukan modal tetap bruto.

Apabila semua inventori akhir tahun ada pada produsen, pedagang dan pemerintah tersebut dikurangi dengan inventori awal tahunnya, maka akan diperoleh perubahan inventori untuk tahun yang bersangkutan. Klasifikasi inventori menurut sekto dan jenis barang terdiri dari:

1. Sektor Penghasil Barang, sektor ini terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, gas dan air minum, serta bangunan dengan jenis inventori sebagai berikut:
 - a. Bahan baku dan bahan penolong
 - b. Barang-barang yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum terjual
 - c. Binatang ternak yang dipelihara untuk dipotong dan binatang ternak lainnya kecuali ternak yang termasuk dalam pembentukan modal tetap
 - d. Barang-barang hasil produksi yang siap untuk dijual
2. Pedagang besar dan eceran, barang-barang yang ada pada pedagang besar dan pedagang eceran baik yang akan dijual ataupun yang akan dipakai sebagai bahan baku penolong termasuk pembungkus, pengepak, dan lain-lain

3. Sektor Penghasil Barang Lainnya, diantaranya mencakup inventori minyak dan bahan bakar lainnya dan barang untuk perbaikan dan pemeliharaan
4. Barang-barang strategi pemerintah, berupa bahan pangan dan bahan bakar yang disediakan untuk keperluan pada waktu kritis

Metode yang digunakan dalam mengestimasi perubahan inventori adalah berdasarkan residual/sisa yang dihitung dari total PDRB hasil penjumlahan NTB sektoral dikurangi dengan jenis penggunaan komponen permintaan akhir lainnya yaitu, konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto. Nilai perubahan inventori atas dasar harga konstan didapat dengan cara mengurangi PDRB sektoral atas dasar harga konstan dengan komponen penggunaan PDRB lainnya atas dasar harga konstan yaitu, , konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto.

2.6. PENGHITUNGAN EKSPOR-IMPOR

Ekspor dan Impor barang dan jasa merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu daerah/negara dengan penduduk daerah/negara lain. Penduduk yang dimaksud adalah lembaga pemerintah, perorangan, perusahaan swasta, perusahaan Negara, serta lembaga swasta nirlaba yang berada di daerah tersebut. Kegiatan transaksi tersebut meliputi ekspor dan impor barang, jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, dan jasa lainnya seperti jasa perdagangan yang diterima pedagang suatu daerah karena mengadakan transaksi barang di luar daerah. Transaksi barang dan jasa pada prinsipnya harus dicatat

pada saat kepemilikan barang tersebut berpindah atau pada saat jasa tersebut diberikan atau diterima.

Ekspor barang dinilai dengan harga *fob (free on board)*, sedangkan impor barang dinilai dengan harga *cif (cost insurance and freight)*. Ekspor dinilai pada saat barang tersebut diberikan ke bukan penduduk domestik, sedangkan impor dinilai pada saat barang tersebut diterima oleh penduduk. Termasuk dalam kegiatan ekspor adalah pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut.

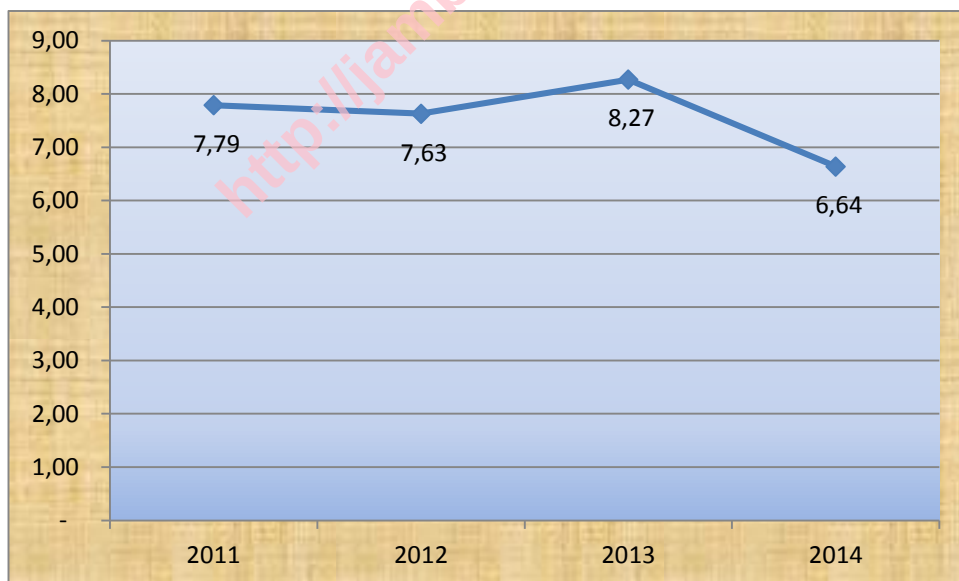
Pembelian langsung barang dan jasa di wilayah domestik suatu daerah oleh bukan penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai kegiatan ekspor. Sedangkan pembelian langsung barang dan jasa di luar daerah oleh penduduk daerah tersebut dikategorikan sebagai impor. Barang milik penduduk atau bukan penduduk suatu daerah yang melintasi batas geografis suatu daerah karena merupakan tempat persinggahan saja, barang untuk peragaan, barang contoh, dan barang keperluan sehari wisatawan mancanegara/ domestik tidak dimasukkan sebagai ekspor atau impor.

BAB III

TINJAUAN PDRB KOTA JAMBI MENURUT PENGGUNAAN 2014

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami perkembangan yang terus positif. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi semakin naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 7,79 persen, menjadi 7,63 persen pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,27 persen dan sedikit melambat pada tahun 2014 menjadi 6,64 persen.

Grafik 1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi 2011-2014



Dalam kurun waktu 2011 sampai 2014, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen terbesar dalam penggunaan PDRB Kota Jambi, namun menunjukkan tren yang menurun sepanjang tahun tersebut. Pada

Tahun 2014 hampir dua pertiga dari PDRB penggunaan disumbang dari komponen konsumsi rumah tangga tersebut. Sebagian besar komponen konsumsi rumah tangga didominasi oleh komponen makanan, minuman dan rokok.

Sisanya PDRB penggunaan Kota Jambi disumbang oleh komponen lain yaitu Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nirlaba sebesar 1,47 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 22,78 persen; pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 22,78 persen; perubahan inventori sebesar 0,23 persen; ekspor sebesar 85,32 persen; serta dikurangi impor sebesar 95,02 persen.

Pada Tahun 2011-2014, persentase ekspor Kota Jambi selalu lebih kecil dibanding impornya, indikasi yang dapat dilihat dari hal tersebut adalah ekspor netto Kota Jambi bernilai negatif.

3.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang sumbangannya paling besar dalam pembentukan PDRB penggunaan Kota Jambi. Dalam 4 tahun terakhir kontribusi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga bergerak dari 71 persen menjadi 61 persen. Bisa dikatakan bahwa sekitar dua pertiga dari pendapatan total regional Kota Jambi masih digunakan untuk konsumsi rumah tangga, Jika dilihat perbandingan persentase dari 7 sub komponen tersebut, sebagian besar pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Jambi digunakan untuk makanan, minuman dan rokok.

Perbandingan antara pengeluaran yang dialokasikan untuk makanan dan non-makanan dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan dibanding total pengeluaran,

mengindikasikan adanya tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan sisa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Pada tingkat kesejahteraan yang rendah, masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan makanan saja.

3.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Pengeluaran konsumsi lembaga LNPRT memiliki kontribusi yang kecil dibanding komponen-komponen lain pada PDRB Kota Jambi menurut penggunaan. Pada tahun 2014 pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba hanya menyumbang 1,47 persen dari total PDRB Kota Jambi menurut penggunaan. Persentase komponen ini dari Tahun 2012-2014 nilainya berkisar pada nilai tersebut walaupun ada kenaikan yang kecil. Kenaikan pengeluaran konsumsi nirlaba ini diantaranya disebabkan adanya perhelatan persiapan PEMILU 2014 yang dikeluarkan oleh partai politik.

3.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Pada kurun waktu 2012 sampai 2014, pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi, namun besaran sumbangannya semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa peranan pemerintah dalam perekonomian Kota Jambi masih terbilang besar. Pada tahun 2014, sumbangan dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 22,78 persen, menurun dibanding Tahun 2013 yang masih 25,84 persen.

Mengingat sumbangannya yang masih relatif besar, sebenarnya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah berpotensi untuk menjadi faktor penggerak bagi perkembangan PDRB. Jika belanja pemerintah dipergunakan pada hal-hal yang tepat, maka efek pengali (*multiplier effect*) bagi perekonomian yang dihasilkan niscaya akan besar nilainya. Pengeluaran pemerintah yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dipercaya akan memperbaiki iklim usaha di daerah tersebut.

3.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP DOMESTIK BRUTO

Komponen PMTB mempunyai peranan penting terkait dengan fungsi investasi sebagai penggerak perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, dimana pada Tahun 2013 besarnya PMTB adalah 26,17 persen menjadi 24 persen pada Tahun 2014.

Berdasarkan distribusi persentase, besarnya PMTB Kota Jambi sekitar seperempat dari nilai PDRB, hal ini berarti bahwa sekitar seperempat pengeluaran regional Kota Jambi pada Tahun 2014 dipergunakan untuk melakukan pembelian barang modal untuk keperluan investasi.

3.5. PERUBAHAN INVENTORI

Perubahan inventori tahun 2014 atas dasar harga berlaku sebesar -44.619,52 juta rupiah, artinya pada tahun 2014 inventori yang dipakai dalam proses produksi lebih banyak dibandingkan inventori yang masuk. Porsi komponen perubahan inventori terhadap PDRB Kota Jambi tahun 2014 mencapai -0,23 persen, menurun jika dibandingkan Tahun 2013 sebesar 0,15 persen.

Penurunan perubahan inventori ini karena adanya pengambilan inventori karena sebelumnya terjadi perlambatan ekspor sedangkan inventori sebelumnya stoknya banyak.

3.6. EKSPOR DAN IMPOR

Kegiatan ekspor dan impor yang dicakup dalam PDRB Kota Jambi menurut penggunaan ini adalah ekspor dan impor antar Negara, antar provinsi, dan antar kabupaten/kota. Oleh karena penggunaan PDRB pada masing-masing komponen termasuk juga barang-barang impor, maka nilai impor merupakan faktor pengurang dari nilai ekspor untuk mendapatkan nilai ekspor neto. Ukuran keterbukaan perekonomian suatu daerah dapat ditunjukkan oleh peranan perdagangan daerah tersebut dengan luar daerahnya.

Besarnya nilai ekspor Kota Jambi atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp. 16.734.426,2 juta, meningkat dibanding Tahun 2013 sebesar Rp. 14.010.109,6 juta. Sedangkan nilai impor Kota Jambi pada tahun 2014 sebesar Rp. 18.637.842,75 juta, dimana angka ini naik jika dibandingkan dengan impor di Tahun 2013 yang sebesar Rp. 17.013.090.7 juta.

Dari nilai ekspor dan impor yang terjadi di Kota Jambi ini maka besaran nilai ekspor neto Kota Jambi bernilai negatif, artinya nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impornya. Ekspor netto yang bernilai negative dapat dikatakan bahwa neraca perdagangan barang dan jasa Kota Jambi masih minus.

LAMPIRAN

<http://jambikota.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Penggunaan, (Dalam Juta Rupiah)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014
1. Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	9.682.580,20	10.710.252,07	12.099.274,55
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4.120.088,85	4.541.222,83	5.183.874,88
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	327.827,30	349.824,23	384.066,26
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.435.807,03	1.600.319,04	1.934.691,60
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.359.797,58	1.508.104,32	1.668.993,67
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2.071.243,36	2.309.179,03	2.485.616,32
1.f. Hotel dan Restoran	237.690,73	262.289,15	284.109,78
1.g. Lainnya	130.125,35	139.313,47	157.922,04
2. Penggunaan Konsumsi LNPRT	198.702,89	230.922,51	287.771,20
3. Penggunaan Konsumsi Pemerintah	3.901.597,45	4.287.965,63	4.468.575,35
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3.383.850,59	4.343.269,61	4.706.624,84
4.a. Bangunan	2.808.060,83	3.526.500,72	3.932.352,53
4.b. Non-Bangunan	575.789,76	816.768,89	774.272,31
5. Perubahan Inventori	1.061.714,86	24.950,91	-44.619,52
6. Ekspor	11.600.510,26	14.010.109,59	16.734.426,21
7. Impor	15.207.999,33	17.013.090,68	18.637.842,75
P D R B	14.620.956,92	16.594.379,63	19.614.209,88

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Penggunaan, (Dalam Juta Rupiah)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014
1. Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	8.675.339,62	9.122.704,50	9.598.445,23
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.627.382,43	3.784.085,35	3.992.588,45
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	285.347,09	299.557,54	317.821,85
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1.299.353,95	1.377.964,86	1.466.568,00
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.162.302,19	1.240.641,36	1.316.320,48
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.980.090,50	2.090.975,57	2.160.395,96
1.f. Hotel dan Restoran	211.665,77	219.201,07	225.947,19
1.g. Lainnya	109.197,69	110.278,74	118.803,29
2. Penggunaan Konsumsi LNPRT	177.980,72	193.554,03	223.032,31
3. Penggunaan Konsumsi Pemerintah	3.220.511,44	3.357.061,13	3.411.109,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3.334.421,03	3.878.462,37	3.878.777,58
4.a. Bangunan	2.770.786,63	3.128.772,27	3.192.286,34
4.b. Non-Bangunan	563.634,39	749.690,11	686.491,23
5. Perubahan Inventori	461.526,23	-76.163,57	-51.223,65
6. Ekspor	10.260.059,56	11.721.778,25	12.695.623,86
7. Impor	13.286.697,32	14.291.765,48	14.926.285,22
P D R B	12.843.141,29	13.905.631,23	4.829.479,92

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Penggunaan, (%)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014
1. Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	66,22	64,54	61,69
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,18	27,37	26,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,24	2,11	1,96
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,82	9,64	9,86
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	9,30	9,09	8,51
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,17	13,92	12,67
1.f. Hotel dan Restoran	1,63	1,58	1,45
1.g. Lainnya	0,89	0,84	0,81
2. Penggunaan Konsumsi LNPR	1,36	1,39	1,47
3. Penggunaan Konsumsi Pemerintah	26,68	25,84	22,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	23,14	26,17	24,00
4.a. Bangunan	19,21	21,25	20,05
4.b. Non-Bangunan	3,94	4,92	3,95
5. Perubahan Inventori	7,26	0,15	-0,23
6. Ekspor	79,34	84,43	85,32
7. Impor	104,02	102,52	95,02
P D R B	100,00	100,00	100,00

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Penggunaan, (%)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014
1. Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	4,88	5,16	5,21
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,75	4,32	5,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,80	4,98	6,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,34	6,05	6,43
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,55	6,74	6,10
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,26	5,60	3,32
1.f. Hotel dan Restoran	16,20	3,56	3,08
1.g. Lainnya	3,10	0,99	7,73
2. Penggunaan Konsumsi LNPR	7,98	8,75	15,23
3. Penggunaan Konsumsi Pemerintah	6,33	4,24	1,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	20,60	16,32	0,01
4.a. Bangunan	18,99	12,92	2,03
4.b. Non-Bangunan	29,18	33,01	-8,43
5. Perubahan Inventori	-335,39	-116,50	-32,75
6. Ekspor	7,37	14,25	8,31
7. Impor	13,98	7,56	4,44
P D R B	7,63	8,27	6,64

Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Menurut Penggunaan, (%)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014
1. Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	111,61	117,40	126,05
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	113,58	120,01	129,84
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	114,89	116,78	120,84
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	110,50	116,14	131,92
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	116,99	121,56	126,79
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	104,60	110,44	115,05
1.f. Hotel dan Restoran	112,30	119,66	125,74
1.g. Lainnya	119,16	126,33	132,93
2. Penggunaan Konsumsi LNPR	111,64	119,31	129,03
3. Penggunaan Konsumsi Pemerintah	121,15	127,73	131,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	101,48	111,98	121,34
4.a. Bangunan	101,35	112,71	123,18
4.b. Non-Bangunan	102,16	108,95	112,79
5. Perubahan Inventori	230,04	-32,76	87,11
6. Ekspor	113,06	119,52	131,81
7. Impor	114,46	119,04	124,87
P D R B	113,84	119,34	132,26

Tabel 6. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Penggunaan, (%)

Komponen Penggunaan	2012	2013	2014
1. Penggunaan Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.i.)	6,59	5,19	7,37
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,98	5,66	8,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,49	1,65	3,48
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,13	5,10	13,59
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,19	3,90	4,31
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,16	5,58	4,18
1.f. Hotel dan Restoran	4,09	6,56	5,09
1.g. Lainnya	7,18	6,01	5,22
2. Penggunaan Konsumsi LNPR	5,80	6,86	8,15
3. Penggunaan Konsumsi Pemerintah	8,13	5,43	2,56
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	-2,54	10,35	8,36
4.a. Bangunan	-1,64	11,22	9,29
4.b. Non-Bangunan	-7,08	6,65	3,52
5. Perubahan Inventori	121,07	-114,24	-365,90
6. Ekspor	4,65	5,71	10,28
7. Impor	7,50	4,00	4,89
P D R B	6,00	4,83	10,83

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA JAMBI***

Jl. Basuki Rahmat, Kota Baru – Jambi 36128

Telp/Faks (0741) 40539

Email: bps1571@bps.go.id